



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2014/PA. Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Tahir bin Sinosi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Latappere, Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juli 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soppeng dengan Nomor : 120/Pdt.P/2014/PA.Wsp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Ani, lahir pada tanggal 01 Juli 2000 (Umur 14 tahun, 1 bulan) di Pajalesang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Kartu Keluarga 7312030508103571 tanggal 12 Desember 2011 bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Alimuddin Kuddu bin Kuddu
2. Bahwa, karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Alimuddin Kuddu bin Kuddu, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sumpang Saloe Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa, anak pemohon bernama Ani berstatus perawan dan Alimuddin Kuddu bin Kuddu berstatus jejaka, bahkan pihak keluarga telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut
4. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya, telah bersedia untuk dinikahkan dengan Alimuddin Kuddu bin Kuddu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri, menurut hukum.
6. Bahwa, pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor kk.21.18.04/PW.01/459/2014 tanggal 24 Juli 2014, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng
7. Bahwa, pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Himasari binti Daaming dengan Asis Munandar bin Kardimang, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : *siri*) karena undangan terlanjur telah disebar dan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Tahir bin Sinosi untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Ani dengan tunangannya bernama Alimuddin Kuddu bin Kuddu.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya,

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :



a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Nomor Kk.21.18.04/PW.01/459/2014, tanggal 24 Juli 2014, bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Kart 7312030508103571 tanggal 12 Desember 2011, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Baco Tang bin Pattola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai Kemanakan Pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Ani namun belum cukup umur untuk kawin (Umur 14 tahun).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Ani berumur Umur 14 tahun (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Sabtu tanggal 9 Agustus 2014, namun Kepala Kantor Urusan Agama Lilirilau, menolak untuk menikahkan Ani karena belum cukup umur (16 tahun).
- Bahwa Calon Pengantin Perempuan tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.

Saksi kedua: Ahmar bin Zainuddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon, sebagai Mertua dengan Pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Ani namun belum cukup umur untuk kawin (Umur 14 tahun.).



- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah saling mengenal, bahkan pacaran.
- Bahwa perempuan Ani (calon pengantin perempuan) sudah lama mengalami menstruasi (haid).
- Bahwa keluarga telah menetapkan hari pelaksanaan, akad nikahnya Sabtu tanggal 9 Agustus 2014, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng menolak untuk menikahkan Ani dengan tunangannya karena belum cukup umur (16 tahun).
- Bahwa kedua calon pengantin tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki Alimuddin Kuddu bin Kuddu sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.

Bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anaknya Ani karena usianya 14 tahun, rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, Alimuddin Kuddu bin Kuddu namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi Dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan (Ani) umur 14 tahun, patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Alimuddin Kuddu bin Kuddu meskipun belum cukup umur?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Ani dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa bukti P1, sebagai surat biasa memberi petunjuk adanya pihak pemerintah menolak keinginan pemohon mengawinkan anaknya karena masih di bawah umur, belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang merupakan bukti autentik, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, telah memberi petunjuk adanya anak pemohon telah berusia 14 tahun, 1 bulan .

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014, hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun

Hal 5 dari 8 hal Pen No 120/Pdt.P/2014/PA wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **Al Qur'an maupun Al Hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Bulugun Nikah**" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Alimuddin Kuddu bin Kuddu sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فَلَنِكَوَالَايَمَىٰ مِنْكُمْوَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْوَإِمَائِكُمْ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إِنْ جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينْتَهُوَأَمَانْتَهُفَتَزَوَّجُوهُمْفَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌوَفَسَادٌكَبِيرٌ



artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama Ani.
- Bahwa Ani berumur 14 tahun,
- Bahwa Ani sudah siap dikawinkan dengan laki-laki pilihannya Alimuddin Kuddu bin Kuddu yang sudah lama pacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Sabtu tanggal 9 Agustus 2014, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Tahir bin Sinosi untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Ani binti Tahir, dengan laki-laki yang bernama Alimuddin Kuddu bin Kuddu.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1435



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijeriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abd. Samad**, ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. H. Asnawi Semmauna** hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 5 Agustus 2014 dibantu oleh **Hj. Rusdiah, S.Ag**, panitera pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti

t.t.d

Hj. Rusdiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 75.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 166.000,00 |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal 8 dari 8 hal Pen No 120/Pdt.P/2014/PA wsp